

DAFTAR ISI

	Hal
PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Metode Penelitian	15
E. Manfaat/Signifikansi Penelitian	16
F. Sistematika Disertasi	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
A. <i>Civic Governance</i>	20
1. Konsep <i>Civic Governance</i>	20
2. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Landasan Konsep <i>Civic Governance</i>	27
3. Pembangunan Karakter Bangsa dalam Konsep <i>Civic Governance</i>	41
B. Partisipasi Masyarakat	48
1. Peran Partisipasi Masyarakat dalam Kehidupan Bernegara	48
2. Kebijakan Pemerintah tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan	53
C. Penyelenggaraan Pemerintahan	60
1. Konsep Otonomi Daerah	60
2. Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Bandung	72
3. Konsep <i>Good Governance</i>	101
4. Konsep Integrasi Nasional	110
D. Review Penelitian Terdahulu	114

BAB III	METODE PENELITIAN	125
	A. Lokasi dan Populasi/Sampel Penelitian	125
	B. Desain Penelitian	127
	C. Metode Penelitian	129
	D. Definisi Operasional	130
	E. Instrumen Penelitian	132
	F. Proses Pengembangan Instrumen	133
	G. Teknik Pengumpulan Data	145
	H. Analisis Data	146
	I. Jadwal Penelitian	147
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	150
	A. Hasil Penelitian	150
	1. Penguatan <i>Civic Governance</i> dalam Kerangka Otonomi Daerah	150
	a. Visi, Misi dan Program Kerja Pemerintah	150
	b. Hak Asasi Manusia	154
	c. Penegakkan Prinsip Negara Hukum	157
	2. Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam Memperkuat <i>Civic Governance</i>	161
	a. Partisipasi	161
	b. Efisiensi Manajemen Publik	164
	c. Reformasi Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	167
	3. Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembangunan Karakter Bangsa guna Memperkokoh Integrasi Nasional	171
	a. Akuntabilitas Politik	171
	b. Desentralisasi Kekuatan Politik	174
	c. Pluralisme dalam bidang Politik	177
	4. Pengembangan Model Konseptual Baru dari <i>Civic Governance</i> di Kabupaten Bandung	180
	a. Transparansi dan Akuntabilitas dalam bidang Administrasi Publik	180
	b. Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang	184
	B. Pembahasan	187
	1. Penguatan <i>Civic Governance</i> dalam kerangka Otonomi Daerah	187
	2. Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam memperkuat <i>Civic Governance</i>	200
	3. Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembangunan Karakter Bangsa guna memperkuat Integrasi Nasional	223
	4. Pengembangan Model Konseptual Baru dari <i>Civic Governance</i> di Kabupaten Bandung	243

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	277
	A. Kesimpulan	277
	1. Umum	277
	2. Khusus	277
	B. Saran	280
	1. Umum	280
	2. Khusus	282
	DAFTAR PUSTAKA	286
	RIWAYAT HIDUP	294

